

PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENETAPKAN TATA TERTIB SISWA DI SDN 18 AIR TAWAR

Stevi Febrianti^{1*}

¹ Departemen Administrasi pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

INFOARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 06 Juni 2026

Direvisi pada tanggal 07 Juni 2026

Diterima pada tanggal 26 Juni 2026

Terbit online pada tanggal 30 September 2026

Kata kunci:

pengambilan keputusan, kepala sekolah, tata tertib siswa, disiplin sekolah, manajemen pendidikan



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by CV Thunder Sky Team

ABSTRAK

Pengambilan keputusan merupakan fungsi penting dalam manajemen pendidikan yang sangat mempengaruhi keberhasilan sekolah. Salah satu keputusan strategi yang sering diambil kepala sekolah adalah menetapkan tata tertib siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, disiplin, dan kondusif. Penelitian ini mendeskripsikan proses pengambilan keputusan kepala sekolah dalam mengatur tata tertib siswa di SD Negeri 18 Air Tawar Selatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di SD Negeri 18 Air Tawar Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Narasumber utama adalah Eva Fitria, S.Pd., Wakil Kesiswaan sekolah, yang diwawancarai oleh Stevi Febrianti, mahasiswa Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan proses pengambilan keputusan dilakukan melalui enam tahap: pengumpulan masalah, pengumpulan informasi, musyawarah dengan guru dan tenaga kependidikan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keputusan kepala sekolah didasarkan pada kebutuhan meningkatkan kedisiplinan siswa dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Penerapan tata tertib siswa memberikan dampak positif berupa peningkatan kedisiplinan, tanggung jawab, dan perilaku siswa di sekolah. Namun, masih terdapat kendala seperti perbedaan tingkat kesadaran siswa dalam mematuhi aturan dan perlunya pengawasan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kerja sama yang baik antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa agar kebijakan tata tertib berjalan optimal dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Penelitian ini penting karena menunjukkan bagaimana keputusan kepala sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah dan melibatkan musyawarah, sehingga tata tertib lebih diterima dan efektif. Kerja sama semua pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan disiplin di sekolah dasar.

Penulis Korespondensi:

Stevi Febrianti

Email: stevifebrianti1902@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter yang baik. Dalam pelaksanaannya, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan perilaku dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan lingkungan yang mampu mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Salah satu upaya yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penerapan tata tertib siswa yang berfungsi sebagai pedoman perilaku selama berada di lingkungan sekolah.

Tata tertib siswa merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur berbagai aktivitas peserta didik agar berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tata tertib mencakup berbagai aspek kehidupan sekolah, seperti kedisiplinan waktu, penggunaan seragam, kebersihan lingkungan, sikap selama pembelajaran, serta hubungan sosial antar warga sekolah. Keberadaan tata tertib sangat penting karena dapat membantu menciptakan suasana belajar yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik. Selain itu, tata tertib juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter yang dapat menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan.

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Negeri 18 Air Tawar Selatan masih ditemukan beberapa pelanggaran tata tertib, seperti keterlambatan siswa datang ke sekolah, kurangnya kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran, ketidakpatuhan terhadap aturan berpakaian, serta kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata tertib belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terarah. Dalam situasi ini, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengambil keputusan yang tepat agar tata tertib siswa dapat menjadi pedoman perilaku yang efektif, relevan dengan kebutuhan sekolah, dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang tertib serta kondusif.

Pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai pertimbangan, data, informasi, serta kepentingan pihak-pihak yang terkait. Keputusan yang diambil tidak hanya harus mampu menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik dan kemajuan sekolah. Dalam konteks ini, penetapan tata tertib siswa menjadi salah satu bentuk kebijakan pendidikan yang membutuhkan proses pengambilan keputusan yang sistematis dan partisipatif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti penerapan tata tertib siswa, penelitian ini secara khusus mengkaji proses pengambilan keputusan kepala sekolah dalam merencanakan dan menetapkan tata tertib siswa, mulai dari pengumpulan masalah, pengumpulan informasi, musyawarah, penetapan kebijakan, hingga evaluasi pelaksanaan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana proses pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menetapkan tata tertib siswa serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pengambilan keputusan di lingkungan sekolah serta menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Pendahuluan meliputi latar belakang, landasan teori, permasalahan, rencana pemecahan masalah dan tujuan penelitian.

2. KAJIAN TEORI

Pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dalam sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah aturan, tujuan, dan program yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan seperti peningkatan mutu, pemerataan akses, dan pembentukan karakter peserta didik. Sementara itu, pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik di antara berbagai alternatif yang tersedia. Dalam konteks sekolah, kebijakan pendidikan seringkali diterjemahkan ke dalam bentuk peraturan sekolah, termasuk tata tertib siswa. (Nugroho, 2008) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan yang berisi kumpulan aturan untuk mengatur pelaksanaan sistem pendidikan dan cara mencapai tujuan. Artinya, tata tertib siswa yang ditetapkan kepala sekolah merupakan bagian dari implementasi kebijakan pendidikan yang lebih luas.

Pengambilan keputusan yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatur tata tertib siswa tidak dapat dipisahkan dari teori pengambilan keputusan yang umum. (Simon, 1947) menyatakan bahwa dalam dunia nyata, pengambilan keputusan tidak pernah sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif. Oleh karena itu, kepala sekolah cenderung mengambil keputusan yang "cukup baik" atau memuaskan (satisficing) daripada yang optimal. Ketika kepala

sekolah menetapkan tata tertib siswa, ia tidak hanya mempertimbangkan aturan ideal, tetapi juga kondisi nyata di sekolah, seperti karakteristik siswa, budaya sekolah, ketersediaan guru pengawas, dan dukungan orang tua. (Hoy & Miskel, 2001) menambahkan bahwa dalam organisasi sekolah terdapat empat model pengambilan keputusan: model klasik (bertujuan jelas sebelum mencari alternatif), model administrasi (memuaskan), model penambahan (tujuan dan alternatif yang dicari secara bersamaan), dan model pengimbasan campuran (menggabungkan teori, pengalaman, dan perbandingan). Kepala sekolah sering menggunakan model administrasi atau penambahan karena kondisi sekolah yang dinamis dan kompleks.

Keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan keputusan kepala sekolah dalam menetapkan tata tertib siswa terlihat jelas ketika kita melihat fungsi tata tertib sebagai instrumen kebijakan. Tata tertib siswa bertujuan untuk membentuk karakter, menjaga disiplin, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mencegah pelanggaran. Arif Rohman membagi pendekatan kebijakan pendidikan menjadi dua: *Social Demand Approach* yang didasarkan pada aspirasi masyarakat, dan *Manpower Approach* yang lebih visioner dan otoriter. Dalam menata tata tertib, kepala sekolah bisa menggunakan pendekatan *Social Demand* dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam musyawarah, sehingga tata tertib lebih demokratis dan diterima. Atau kepala sekolah bisa menggunakan pendekatan *Tenaga Kerja* dengan membuat tata tertib berdasarkan visi pendidikan yang ingin dicapai, meskipun kurang partisipatif namun lebih efektif dan terarah. Pendekatan yang dipilih akan mempengaruhi tingkat pemenuhan siswa dan keberlangsungan penerapan tata tertib.

Implementasi tata tertib siswa juga sangat bergantung pada kapasitas kepala sekolah dalam menjalankan kebijakan. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menetapkan sepuluh syarat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara sempurna, di antaranya: kondisi eksternal tidak mengganggu, sumber daya memadai, hubungan sebab-akibat yang jelas, komunikasi dan koordinasi sempurna, serta penyajian penuh dari pelaksana. Dalam konteks tata tertib siswa, ini berarti kepala sekolah harus memastikan bahwa guru, staf, dan siswa memahami aturan, ada sanksi yang jelas dan konsisten, ada mekanisme pengawasan, dan ada dukungan dari orang tua serta masyarakat. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, tata tertib hanya menjadi dokumen tanpa implementasi nyata. Van Meter dan Van Horn juga menekankan enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan: standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi, aktivitas antar organisasi, karakteristik pelaksanaan, dan kondisi sosial-ekonomi-politik. Artinya, tata tertib siswa yang baik tidak hanya tentang aturan yang ketat, tetapi juga tentang bagaimana aturan itu dikomunikasikan, diterapkan, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Selain itu, Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengemukakan analisis kerangka implementasi yang mencakup tiga variabel utama: kemudahan masalah untuk dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, dan variabel pengaruh politik terhadap dukungan tujuan kebijakan. Dalam konteks tata tertib siswa, masalah disiplin siswa dapat sulit dikendalikan jika akar permasalahan kompleks (misalnya masalah keluarga, pergaulan, atau budaya). Kepala sekolah perlu merancang tata tertib yang jelas, terukur, dan terstruktur agar mudah diimplementasikan. Selain itu, dukungan politik dari dinas pendidikan, komite sekolah, dan orang tua juga sangat penting agar tata tertib tidak diabaikan atau diabaikan. Margaret E. Goertz (dalam Riant Nugroho, 2008) menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus efisien dan efektif, termasuk dalam penggunaan anggaran. Tata tertib siswa yang baik tidak memerlukan biaya besar, tetapi memerlukan komitmen, konsistensi, dan pengawasan yang berkelanjutan dari kepala sekolah dan guru.

Pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tata tertib siswa juga ditegaskan oleh Pontjorini, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki pengaruh besar bagi keberlangsungan organisasi sekolah. Kepala sekolah yang baik tidak hanya membuat peraturan, tetapi juga menjadi teladan, mengkomunikasikan visi, dan memastikan penerapan yang konsisten. Peter F. Drucker juga menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis keputusan: keputusan yang bersifat rutin (berulang) dan keputusan yang bersifat unik (baru). Menetapkan tata tertib siswa adalah keputusan yang unik dan strategis, sehingga memerlukan pendekatan yang hati-hati, partisipatif, dan berbasis bukti. Mark Olsen menambahkan bahwa kebijakan pendidikan adalah kunci keunggulan dan eksistensi negara dalam persaingan global, sehingga tata tertib siswa yang baik bukan hanya soal disiplin, tetapi juga tentang membentuk karakter generasi yang siap bersaing di era global.

Dengan demikian, kajian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menetapkan tata tertib siswa merupakan bagian integral dari kebijakan pendidikan yang lebih luas. Keputusan ini didasarkan pada teori pengambilan keputusan (rasional terbatas, model administrasi, model penambahan), dipengaruhi oleh pendekatan kebijakan (*Permintaan Sosial* atau *Ketenagakerjaan*), dan memerlukan implementasi yang memadai (sumber daya, komunikasi, pengawasan). Pendapat para ahli seperti Herbert Simon, Hoy dan Miskel, Riant Nugroho, Hogwood

dan Gunn, Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, Pontjorini, Drucker, dan Olsen memperkuat pemahaman bahwa tata tertib siswa yang efektif tidak hanya tentang aturan yang ketat, tetapi tentang proses pengambilan keputusan yang partisipatif, implementasi yang konsisten, dan evaluasi yang berkelanjutan. Kepala sekolah yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan antara idealisme kebijakan dan kenyataan lapangan, serta mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai proses pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menetapkan tata tertib siswa di SD Negeri 18 Air Tawar Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara langsung dari narasumber mengenai proses, pertimbangan, dan pelaksanaan kebijakan tata tertib siswa di sekolah.

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 18 Air Tawar Selatan yang beralamat di Jalan Merak Perumnas Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekolah ini memiliki akreditasi B dengan jumlah siswa sebanyak 253 orang, jumlah guru sebanyak 16 orang, jumlah staf sebanyak 4 orang, dan memiliki 12 ruang kelas. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut memiliki sistem tata tertib yang diterapkan secara aktif sebagai bagian dari upaya pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung pada hari Jumat, 8 Mei 2026, dengan durasi sekitar 45 menit. Narasumber dalam penelitian ini adalah Eva Fitria, S.Pd. selaku Wakil Kesiswaan SD Negeri 18 Air Tawar Selatan, yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyusunan serta pelaksanaan tata tertib siswa di sekolah. Adapun penanya atau pewawancara adalah Stevi Febrianti, mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang yang melakukan observasi sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Pendidikan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dipilih disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan kepala sekolah dalam mengatur tata tertib siswa didasarkan pada masalah nyata yang terjadi di lapangan, bukan sekadar asumsi. Hal ini terlihat dari adanya pelanggaran yang berulang, seperti keterlambatan, ketidak tertiban dalam berpakaian, dan rendahnya kepedulian terhadap kebersihan sekolah. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dengan guru dan tenaga kependidikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual dan mendapat dukungan dari warga sekolah.

Meskipun banyak pelanggaran yang tidak tergolong tinggi, pihak sekolah menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebiasaan yang dapat mempengaruhi budaya sekolah secara keseluruhan. Kepala sekolah memandang bahwa pembentukan karakter disiplin harus dimulai sejak pendidikan dasar, sehingga diperlukan aturan yang jelas dan dapat dipahami oleh seluruh siswa.

Kepala sekolah tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait kondisi siswa sebelum menata tata tertib. Informasi tersebut diperoleh dari laporan guru kelas, catatan pelanggaran siswa, hasil observasi langsung di lingkungan sekolah, serta masukan dari tenaga kependidikan dan orang tua siswa. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Proses pengambilan keputusan dalam menetapkan tata tertib siswa telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di sekolah, diawali dengan mengidentifikasi masalah, pengumpulan, pelaksanaan informasi rapat atau musyawarah bersama guru dan tenaga kependidikan, penyusunan peraturan, penetapan kebijakan, serta sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Kepala sekolah

selalu mengedepankan prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan agar kebijakan mendapat dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.

Kebijakan tata tertib siswa memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Siswa menjadi lebih tertib dalam mengikuti kegiatan belajar, lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, dan lebih menghargai peraturan yang berlaku. Tata tertib juga membantu guru dalam melakukan pelatihan karakter karena terdapat pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Namun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti perbedaan tingkat kesadaran siswa dalam mematuhi aturan dan perlunya pengawasan yang konsisten dari seluruh guru dan orang tua.

Menurut Eva Fitria, S.Pd. Wakil selaku Kesiswaan, sebagian besar guru memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan tata tertib siswa yang diterapkan oleh sekolah. Guru menilai bahwa keberadaan tata tertib sangat membantu dalam menciptakan suasana belajar yang lebih tertib dan kondusif, serta memberikan dasar yang kuat dalam memberikan pelatihan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Selain guru, orang tua siswa juga memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut karena memahami bahwa tata tertib merupakan bagian dari upaya sekolah dalam membentuk karakter anak, meskipun beberapa orang tua berharap agar penerapan aturan tetap dilakukan secara humanis dan mengedepankan pendekatan pelatihan daripada hukuman.

Keputusan yang dihasilkan adalah ditetapkan tata tertib siswa yang mengatur berbagai aspek kehidupan sekolah, mencakup aturan mengenai kehadiran siswa, penggunaan seragam, kebersihan lingkungan, sikap selama proses pembelajaran, hubungan dengan guru dan teman, serta berbagai larangan yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Kebijakan ini kemudian disosialisasikan kepada siswa, guru, dan orang tua agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama. Selain itu, sekolah juga menetapkan mekanisme pelatihan bagi siswa yang melakukan pelanggaran yang dilakukan secara bertahap dan lebih menekankan pada aspek karakter pendidikan daripada pemberian hukuman semata.

Evaluasi terhadap kebijakan setelah diterapkan menunjukkan bahwa penerapan tata tertib siswa memberikan dampak yang cukup positif terhadap kehidupan sekolah. Tingkat kedisiplinan siswa mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, siswa menjadi lebih tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah, lebih menjaga kebersihan lingkungan, serta lebih menghormati guru dan teman-temannya. Suasana belajar juga menjadi lebih kondusif sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah diterapkan melalui pengamatan langsung, laporan guru, serta diskusi dalam rapat sekolah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 18 Air Tawar Selatan, Kecamatan Padang Utara, ditemukan bahwa sekolah telah menetapkan tata tertib yang menjadi pedoman bagi seluruh peserta didik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Tata tertib ini merupakan keputusan yang ditetapkan oleh kepala sekolah sebagai upaya untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, aman, nyaman, dan mendukung pembentukan karakter siswa.

Adapun ketentuan tata tertib yang berlaku di SDN 18 Air Tawar Selatan meliputi beberapa aspek, yaitu:

a. . Ketentuan Umum

1. Peserta didik hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum pukul 07.00.
2. Peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan tertib dan bertanggung jawab.
3. Setiap peserta didik menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah.

b. . Ketertiban Berpakaian

1. Menggunakan seragam sekolah sesuai hari dan ketentuan yang berlaku.
2. Seragam dalam keadaan bersih, rapi, dan sopan.
3. Menggunakan sepatu dan atribut sekolah secara lengkap.
4. Peserta didik membawa bekal dan perlengkapan sholat.

c. Ketertiban Belajar

1. Mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh.
2. Tidak mengganggu teman selama proses pembelajaran berlangsung.
3. Membawa perlengkapan belajar sesuai jadwal.
4. Meminta izin kepada guru apabila ingin keluar kelas.

d. Sikap dan Perilaku

1. Menghormati guru, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik.
2. Bertutur kata sopan dan tidak berkata kasar.
3. Dilarang melakukan perundungan (bullying) dalam bentuk apa pun.
4. Menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan bermusyawarah.

e. Ketertiban Lingkungan

1. Menjaga kebersihan kelas, toilet, dan halaman sekolah.
2. Membuang sampah pada tempatnya.
3. Menjaga fasilitas sekolah agar tetap berfungsi dengan baik.

f. Larangan

1. Membawa barang berbahaya ke sekolah.
2. Keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin.
3. Merusak fasilitas sekolah.
4. Membawa barang yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar.

g. Sanksi Pelanggaran

Sanksi diberikan secara mendidik dan bertahap, yaitu:

1. Teguran lisan.
2. Nasihat dan pembinaan.
3. Tugas edukatif.
4. Pemanggilan orang tua/wali apabila pelanggaran dilakukan secara berulang.

Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah SDN 18 Air Tawar Selatan telah menetapkan tata tertib yang mencakup aspek kedisiplinan, ketertiban belajar, sikap dan perilaku, kebersihan lingkungan, serta aturan larangan dan sanksi. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, berakhlak baik, serta mampu menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif untuk proses pembelajaran.

Pembahasan

Temuan bahwa kebijakan tata tertib siswa dilatar belakangi oleh masalah kedisiplinan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kepala sekolah bersifat responsif terhadap masalah nyata di lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Simon, 1947) tentang rasionalitas terbatas di mana keputusan diambil berdasarkan masalah yang teridentifikasi, bukan sekedar berasumsi. Tata tertib siswa berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk karakter disiplin sejak dini, yang sejalan dengan pandangan (Nugroho, 2008) bahwa kebijakan pendidikan merupakan respon terhadap kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan dan berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial untuk membentuk karakter.

Pendekatan berbasis data yang diterapkan kepala sekolah menunjukkan bahwa pengambilan keputusan telah memenuhi prinsip pengambilan keputusan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa standar dan tujuan kebijakan harus didasarkan pada informasi yang valid. Penggunaan data membuat keputusan lebih objektif dan sesuai kebutuhan sekolah, bukan berdasarkan asumsi semata, yang juga mendukung pandangan (Hoy & Miskel, 2001) tentang model administrasi dalam pengambilan keputusan sekolah yang bersifat memuaskan namun tetap rasional berdasarkan informasi yang tersedia.

Proses pengambilan keputusan yang mengedepankan musyawarah menunjukkan penerapan prinsip demokratis dalam manajemen pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendekatan Pendekatan Permintaan Sosial menurut Arif Rohman di mana kepala sekolah melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan. Proses ini juga sejalan dengan Multiple Streams Framework dari Kingdon yang menjelaskan bahwa kebijakan yang baik lahir dari pertemuan aliran masalah, solusi, dan dukungan politik, dalam hal ini dukungan guru dan orang tua. Musyawarah juga memastikan bahwa keputusan memenuhi prinsip manajemen pendidikan yang baik dan mendapat legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Temuan kelebihan tata tertib dalam meningkatkan kedisiplinan sejalan dengan pendapat Pontjorini yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki pengaruh besar bagi keberlangsungan organisasi sekolah. Peningkatan kedisiplinan menunjukkan bahwa tata tertib berhasil sebagai instrumen pembentukan karakter. Namun, kekurangan yang ditemukan mencerminkan tantangan implementasi yang dijelaskan oleh Hogwood dan Gunn dalam sepuluh syarat kebijakan implementasi, khususnya terkait ketaatan penuh dan

koordinasi yang sempurna. Perbedaan kesadaran siswa menunjukkan bahwa kebijakan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan berkelanjutan dari semua pihak.

Dukungan positif dari guru dan orang tua menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mendapat legitimasi sosial. Hal ini sejalan dengan Advocacy Coalition Framework (ACF) yang menekankan pentingnya kondisi aktor yang berbagi keyakinan dasar dalam mendukung kebijakan. Harapan orang tua untuk pendekatan humanis juga mencerminkan prinsip pendidikan karakter yang humanis, bukan hanya tekanan hukuman, sesuai dengan pandangan Mark Olsen bahwa kebijakan pendidikan harus membentuk karakter generasi yang siap bersaing di era global dengan nilai-nilai demokrasi.

Tata tertib yang komprehensif menunjukkan bahwa kepala sekolah telah menerapkan pendekatan sistematis dalam penyusunan kebijakan. Cakupan yang luas mencerminkan pemahaman bahwa disiplin adalah konsep holistik. Mekanisme pelatihan yang menekankan karakter pendidikan daripada hukuman sejalan dengan pandangan Margaret E. Goertz bahwa kebijakan pendidikan harus efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendekatan pelatihan bertahap juga menunjukkan penerapan prinsip inkrementalisme dari Lindblom, yaitu perubahan kebijakan secara bertahap, bukan reformasi drastis.

Dampak positif yang ditemukan menunjukkan bahwa kebijakan telah mencapai tujuannya, sesuai dengan indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Evaluasi berkala menunjukkan komitmen sekolah terhadap perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran kebijakan (policy learning). Fleksibilitas untuk memperbaiki aturan sesuai perkembangan kondisi siswa mencerminkan penerapan prinsip teori keseimbangan bersela, yaitu kebijakan dapat mengalami penyesuaian besar ketika diperlukan. Pendekatan evaluatif ini juga mendukung pandangan Mazmanian dan Sabatier bahwa kemudahan masalah untuk mengendalikan dan kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi adalah variabel kunci keberhasilan kebijakan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah SD Negeri 18 Air Tawar Selatan mengambil keputusan dalam menetapkan tata tertib siswa melalui proses yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Keputusan tersebut didasarkan pada permasalahan kedisiplinan siswa yang ditemukan di sekolah, seperti keterlambatan, ketidakpatuhan terhadap aturan pakaian, dan kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Sebelum menetapkan kebijakan, kepala sekolah mengumpulkan informasi dari guru, catatan pelanggaran, observasi, serta masukan dari tenaga kependidikan dan orang tua, kemudian membahasnya melalui musyawarah bersama. Hasilnya, tata tertib siswa ditetapkan untuk mengatur kehadiran, pakaian, sikap, kebersihan, larangan, dan sanksi yang bersifat mendidik.

Penerapan tata tertib tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan, tanggung jawab, dan perilaku siswa, serta membantu menciptakan suasana belajar yang lebih tertib dan kondusif. Meskipun masih terdapat kendala berupa perbedaan tingkat kesadaran siswa dan perlunya pengawasan yang berkelanjutan, kebijakan ini dinilai efektif karena dijalankan dengan pendekatan pelatihan dan evaluasi secara terus-menerus. Dengan demikian, pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menetapkan tata tertib siswa tidak hanya berfungsi sebagai aturan disiplin, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik di sekolah dasar.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Jasrial, M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Fitria, S.Pd., selaku Wakil Kesiswaan SD Negeri 18 Air Tawar Selatan, yang telah bersedia menjadi narasumber serta meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan membantu proses pengumpulan data dalam penyusunan artikel ini. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian artikel ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

7. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

- Dunn, WN (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* . Pers Universitas Gadjah Mada.
- Hogwood, BW, & Gunn, LA (1984). *Analisis kebijakan untuk dunia nyata* . Pers Universitas Oxford.
- Hoy, WK, & Miskel, CG (2001). *Administrasi pendidikan: Teori, penelitian, dan praktik* . McGraw-Hill.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Panduan Pembinaan Karakter dan Tata Tertib Peserta Didik di Sekolah*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kingdon, JW (2011). *Agenda, alternatif, dan kebijakan publik* . orang panjang.
- Lindblom, CE (1959). Ilmu “berjuang melewati masalah”. *Public Administration Review*, 19 (2), 79–88.
- Mazmanian, DA, & Sabatier, PA (1983). *Implementasi dan kebijakan publik* . Scott Mandor.
- Moleong, LJ (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* . PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2017). *Menjadi kepala sekolah profesional* . PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan pendidikan* . Pustaka Pelajar.
- Rohman, A. (2009). *Kebijakan pendidikan: Analisis dan implementasi* . Aswaja Pressindo.
- Siagian, SP (2003). *Administrasi Filsafat* . PT Bumi Aksara.
- Simon, HA (1947). *Perilaku administratif* . Macmillan.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* . Alfabet.
- Suharsimi Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, HAR, & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik* . Pustaka Pelajar.
- Wibowo. (2016). *Manajemen kinerja* . Rajawali Pers.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* . CAPS.